



Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 42 Tahun 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

- (1) APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.548.191.745.812,00 (Satu triliun lima ratus empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.423.351.613.620,00
b. Belanja Daerah	Rp1.548.191.745.812,00
Defisit/Surplus	Rp (124.840.132.192,00)

c. Pembiayaan . . .

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp 124.840.132.192,00
2. Pengeluaran	Rp -
Pembiayaan Netto	Rp 124.840.132.192,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp -

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek. Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara;
10. Lampiran X . . .

10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI Formulir komitmen Pemerintah Kabupaten menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,



MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,



MARHABAN

10. Lampiran X Rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI Formulir komitmen Pemerintah Kabupaten menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri;

Pasal 4


Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG APBK T.A. 2024	1
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG APBK T.A. 2024	25
1 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	25
2 DINAS PENDIDIKAN DAYAH	39
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53
4 DINAS KESEHATAN	86
5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158
6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	194
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	208
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	224
9 DINAS SOSIAL	240
10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	281
11 DINAS PANGAN	293
12 DINAS PERTANAHAN	306
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	318
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	340
15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong	363
16 DINAS PERHUBUNGAN	383
17 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	399
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	423
19 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	465
20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	481
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	501
22 DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	519
23 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	524
24 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	542
25 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	557
26 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	565
27 SEKRETARIAT DAERAH	567
28 SEKRETARIAT DPRK	603
29 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	621
30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	631
31 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	667
32 INSPEKTORAT	693
33 KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN	712
34 KECAMATAN KAWAY XVI	723
35 KECAMATAN SAMATIGA	735
36 KECAMATAN WOYLA	746
37 KECAMATAN SUNGAI MAS	758
38 KECAMATAN MEUREUBO	770
39 KECAMATAN PANTE CEUREUMEN	782
40 KECAMATAN BUBON	908
41 KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK	804
42 KECAMATAN WOYLA TIMUR	796
43 KECAMATAN WOYLA BARAT	825
44 KECAMATAN PANTON REU	837
45 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	848
46 SEKRETARIAT MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA	867
47 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN	878
48 DINAS SYARIAH ISLAM	889
49 DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN PENERIMA HIBAH DAERAH (Lamp. III)	909
50 DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL (Lamp. IV)	923
51 DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS (Lamp. V)	927
52 DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL (Lamp. VI)	929
53 Rincian Dana Otonomi Khusus (Lamp. VII)	932
54 RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMIDAN PERTAMBANGAN GAS ALAM (Lamp. VIII)	953
55 RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (Lamp. IX)	954
56 SINKRONISASIKEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (Lamp. X) KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PDN) YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN, BIDANG URUSAN,	955
57 SKPD,KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA PEMBIAYAAN (Lamp. XI)	956



KABUPATEN ACEH BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	166.112.470.836,00
4.1.01	Pajak Daerah	26.159.492.758,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	159.880.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	158.380.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	158.380.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	1.500.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.688.676.253,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.008.676.253,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.008.676.253,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	32.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	32.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	48.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	48.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.600.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.600.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	220.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	205.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	205.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	470.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	395.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	395.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.518.676.253,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.518.676.253,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.518.676.253,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	5.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	120.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	120.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	120.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	45.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.511.323.747,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.141.323.747,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.141.323.747,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	370.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	370.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.920.936.505,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.920.936.505,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.920.936.505,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.383.502.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.262.377.916,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.222.770.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.222.770.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.900.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.900.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	989.607.916,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	138.555.059,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	851.052.857,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.996.124.084,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.513.252.779,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.998.320.779,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	184.932.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	330.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	367.271.305,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	367.271.305,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	15.600.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	15.600.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	125.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	12.000.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	12.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	113.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	113.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.300.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.300.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.300.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.269.476.078,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.700.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.700.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00
4.1.04.13.02.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	5.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.149.476.078,00
4.1.04.15.14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	1.149.476.078,00
4.1.04.15.14.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	1.149.476.078,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	102.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	15.000.000,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	12.500.000.000,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	12.500.000.000,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	12.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.241.247.930.528,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.201.682.654.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	924.442.222.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	144.006.737.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.616.764.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.113.252.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.195.753.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	233.929.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.982.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	98.164.221.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	24.842.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	7.264.012.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.384.982.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	602.391.336.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	602.391.336.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.761.814.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	876.059.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.342.481.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.575.681.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	521.336.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	943.981.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	16.043.398.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.574.725.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.749.088.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	19.906.371.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.060.308.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.168.386.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	108.282.335.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.000.000.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	23.994.070.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.200.000.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	41.666.233.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.697.446.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.748.283.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	120.000.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	964.100.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	9.092.524.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	308.601.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.510.757.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	6.377.543.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	415.331.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	585.147.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.602.300.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	41.063.904.000,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	41.063.904.000,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	41.063.904.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	228.644.436.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	228.644.436.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	228.644.436.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.532.092.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.532.092.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.532.092.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.565.276.528,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	39.565.276.528,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.565.276.528,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.051.190.954,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.354.845.243,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.445.727.349,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.574.634,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.679.938.348,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.991.212.256,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.991.212.256,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.991.212.256,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.991.212.256,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.991.212.256,00
	Jumlah Pendapatan	1.423.351.613.620,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.012.173.939.938,00
5.1.01	Belanja Pegawai	620.301.315.583,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	408.971.211.914,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	305.021.148.251,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	265.686.483.313,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.334.664.938,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.158.481.207,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.615.416.362,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.543.064.845,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.861.251.250,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.861.251.250,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.727.666.725,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.329.244.125,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.398.422.600,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.682.080.362,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.202.383.500,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.479.696.862,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.363.362.365,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.671.502.622,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.691.859.743,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	971.043.586,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	971.043.586,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.339.453,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.669.784,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	669.669,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.855.615.860,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.980.033.764,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.875.582.096,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	724.797.666,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	628.031.739,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	96.765.927,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.166.619.552,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.884.109.883,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	282.509.669,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.434.805.637,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.434.805.637,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.850.680.300,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.364.875.400,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.558.475.400,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	806.400.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	35.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	35.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	85.450.804.900,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	81.329.204.900,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.121.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.109.658.283,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.533.991.700,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.522.818.869,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.172.831,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	157.016.448,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	200.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	34.042.114,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
5.1.01.03.02.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.260.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	19.873.054,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.121.280,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.520.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	41.666.233.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	41.666.233.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.458.563.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.458.563.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.697.446.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.697.446.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.501.095.138,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	15.501.095.138,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.095.312.997,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.710.268.997,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	328.044.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.698.245.086,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.974.100,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.974.100,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.398.280,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.398.280,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.455.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	75.455.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.048.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.048.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	317.372,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	317.372,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.698.111.734,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.691.062,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.644.800.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.207.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.207.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.935.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	235.935.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	90.720.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	39.778.800.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	39.778.800.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	39.778.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.237.948.517,00
5.1.02.01	Belanja Barang	57.629.934.748,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.961.142.397,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	481.504.865,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	511.974.450,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.916.839.984,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.161.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	68.666.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	84.398.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.100.985.465,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.060.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.973.949.608,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.873.368.863,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.733.860.032,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	164.680.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.637.188.781,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	605.249.880,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.359.124.328,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	906.288.443,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	307.207.843,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	162.584.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.125.392.650,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	835.609.938,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	314.430.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.459.481.431,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	487.662.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.310.557.336,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.654.338.542,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	99.655.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	445.230.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.009.226.354,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	84.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	531.250.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	31.200.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	52.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	94.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	282.375.004,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	187.500.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	46.340.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.668.792.351,00
5.1.02.01.04.0096	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	25.000.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.000.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	802.618.000,00
5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.671.174.351,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	150.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.276.163.573,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	80.860.424.411,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.116.547.900,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.663.742.044,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	656.300.960,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	35.270.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	55.300.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.250.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	3.750.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	229.401.500,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	537.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.523.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.076.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	113.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	194.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.809.683.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	370.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.861.950.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	492.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	52.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.638.597.140,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	413.150.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.652.210.400,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.005.815.710,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.002.900.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.777.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	549.400.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	244.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	382.880.613,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.300.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	935.272.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	412.712.820,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.326.889.830,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.031.996,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.726.911.986,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	165.064.650,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.831.452.462,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	44.600.400,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	200.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.014.619.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	209.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.720.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	6.516.414.422,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.754.976.881,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	276.822.661,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	31.812.480,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.452.802.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.594.213.340,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	24.800.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.998.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	335.013.600,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35.048.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	766.508.740,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	156.440.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	191.200.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	68.205.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	895.210.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	7.800.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	477.610.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	241.300.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	58.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.011.520,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	12.011.520,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	35.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	772.500.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	12.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	760.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	590.389.880,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	590.389.880,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.251.532.288,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.369.271.312,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	211.788.600,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	10.189.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.542.392.439,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.285.853.184,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	467.126.252,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.600.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	13.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	184.330.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.440.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	653.586.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.860.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	33.104.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	71.850.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	486.635.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	100.150.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.891.037,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	146.975.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	57.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.882.260.976,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.760.342.081,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.984.270.925,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	137.647.970,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.788.212.348,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.788.212.348,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.066.654.838,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.940.532.510,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.781.025.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.453.015.560,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.453.015.560,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.174.515.560,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	278.500.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.567.890.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.567.890.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.567.890.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.271.200.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.271.200.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.271.200.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.786.748.547,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.230.908.547,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.230.908.547,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.230.908.547,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	555.840.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	555.840.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	555.840.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	66.445.386.620,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.000.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	33.000.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	33.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.453.756.620,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	755.603.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	755.603.500,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	320.684.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	70.684.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	31.377.469.120,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	578.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.799.469.120,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	991.630.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	991.630.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	991.630.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.402.540.671,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.977.540.671,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	10.977.540.671,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.977.540.671,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	315.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	315.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	315.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	110.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	215.625.239.598,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.952.784.084,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	75.964.100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	75.964.100,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	36.900.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	39.064.100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.850.711.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.850.711.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.205.157.667,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	785.433.333,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.110.120.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.103.840,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.290.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.290.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	47.813.840,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	12.813.840,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	35.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.482.838.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.482.838.800,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9.780.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	1.500.000.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	915.540.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	5.100.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	52.418.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.560.356.080,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	427.760.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.371.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	245.888.700,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	177.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.017.995.880,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.714.366.323,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.619.620,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.305.205.744,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.369.480,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	956.112.633,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.322.080,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	114.600.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	107.100.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	630.945.200,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	224.790.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	190.800.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	33.990.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	406.155.200,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	406.155.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.516.255.601,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.516.255.601,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	236.823.630,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	448.000.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	608.060.639,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	73.800.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.016.856.019,00
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	39.737.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.092.978.313,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	396.284.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	396.284.000,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	396.284.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.170.441.370,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.912.292.061,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.912.292.061,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.258.149.309,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.125.420.669,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	127.728.640,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	157.344.093,00
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	157.344.093,00
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	157.344.093,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	60.300.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	60.300.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	60.300.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	2.800.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.800.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	2.800.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	49.440.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	49.440.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	49.440.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.950.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.950.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.950.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.178.336.194,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.064.608.994,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.064.608.994,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.605.393.934,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	120.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.060.585.182,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.912.212.675,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.139.894.536,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.176.522.667,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	113.727.200,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	113.727.200,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	113.727.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.218.907.320,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	86.714.692.209,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	79.336.812.209,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	67.626.544.709,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	11.710.267.500,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.377.880.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.377.880.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.883.337.111,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.299.725.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.300.000.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	4.999.725.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.633.865.010,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.633.865.010,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.949.747.101,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	672.361.101,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.277.386.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	41.620.878.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.475.188.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.475.188.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	36.295.690.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	31.363.190.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.932.500.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	100.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.750.000.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.750.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.212.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	63.052.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	63.052.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	63.052.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	212.160.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	8.160.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.160.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	204.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	204.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	306.392.566.276,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.954.299.476,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.615.949.276,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.615.949.276,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.615.949.276,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.350.200,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.350.200,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.350.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.438.266.800,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	228.644.436.000,00
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	228.644.436.000,00
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	228.644.436.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	73.793.830.800,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	73.793.830.800,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	73.793.830.800,00
	Jumlah Belanja	1.548.191.745.812,00
	Total Surplus/(Defisit)	-124.840.132.192,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	124.840.132.192,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.840.132.192,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	124.840.132.192,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	124.840.132.192,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	124.840.132.192,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	124.840.132.192,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 Pj. Bupati Aceh Barat
 Mahdi